

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 Perubahan telah selesai disusun. Penyusunan Renja Perubahan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 mengevaluasi dari Rencana Kerja tahun lalu serta menjawab visi dan misi kepala daerah, isu isu pembangunan yang terkait dengan Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2022.

Dokumen Renja Perubahan ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada Tahun 2022, penetapan isu-isu strategis, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja dengan penyempurnaan Target Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan pada Tahun 2022.

Disadari sepenuhnya bahwa Dokumen Renja Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen Renja ini.

Wassalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Sidoarjo, 30 Juni 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. Ec. TJARDA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196401051988101003

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	8
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	8
BAB III	65
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	65
BAB IV	95
PENUTUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Perubahan Renja PD memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Tahunan Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo yaitu tentang optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menitikberatkan pada Peningkatan Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan.

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 sesuai dengan rencana program prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD Tahun 2022 yang disusun ke dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan Renja PD

pada tahun berjalan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dokumen Renja Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Dalam melakukan tugas selama sisa tahun berjalan perencanaan kegiatan yang terinci dan waktunya sangat diperlukan dalam mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam sisa tahun berjalan, Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program/kegiatan selama kurun waktu 1 tahun.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta menjadi informasi bagi pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah :

1. Menyusun dokumen perencanaan dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan serta menentukan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo dalam 1 tahun.
2. Mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.
3. Terwujudnya penilaian kinerja serta kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terukur antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kinerja urusan Perindustrian dan Perdagangan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Penetapan Program Dan Kegiatan
- 3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra PD

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

- a. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money* Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Beberapa hal dapat kami sajikan Review hasil evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah antara lain yang memuat :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Tribulan I Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tribulan 1 Tahun 2022

Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
Meningkatkan daya saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				

sektor industri																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Person	90	Rp 0,00	0	Rp 25.713.461.000	90	Rp 29.234.676.752,00	0	Rp 4.828.472.888,00	0	Rp 7.808.328.873,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 12.636.801.761,00	0%	43%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	1	Rp 0,00	1	Rp 118.744.380,00	1	Rp 56.093.000,00	1	Rp 15.133.600,00	0	Rp 15.674.400,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 30.808.000,00	100%	54%
		Jumlah tahapan perencanaan yang	Tahapan	3		6		3		1		1		0		0		2		66%	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	Person	90	Rp 0,00	0	Rp 0,00	90	Rp 11.602.900,00	100	Rp 0,00	93.63	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	193.63	Rp 0,00	100%	0%
		Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	Person	10	0	0	10	3.68	2.5	0	0	6.18	61%							
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Peran gkat	kali	4	Rp 0,00	0	Rp 0,00	4	Rp 11.602.900,00	1	Rp 0,00	1	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 0,00	50%	0%

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perse ntase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	perse n	100	Rp 0,00	100	Rp 308.014.613,00	100	Rp 467.022.674,00	25	Rp 95.063.850,00	50	Rp 107.021.528,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	75	Rp 202.085.378,00	75%	43%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	Jenis	5	Rp 0,00	0	Rp 277.132.429,00	5	Rp 2.419.066.800,00	4	Rp 285.264.198,00	1	Rp 22.899.499,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	5	Rp 308.163.697,00	100%	12%
			Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	2	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 1.140.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%

Jabatan	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	unit	5	5	5	0	0	0	0	0	0%

PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAN GAN	Persentase Pasar SNI	%	Jumlah pasar yang memenuhi kriteria SNI		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		Rp		%	%		
			31	Rp 0, 00	5. 26	Rp 18.519 .608.9 31,00	15. 78	Rp 12.787 .773.8 35,00	5.26	Rp 1.436. 960.83 2,00	10.52	Rp 2.586.17 7.851,00	0	Rp 0, 0	0	Rp 0, 00			15.7 8	Rp 4.023.13 8.683,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang memenuhi kriteria SNI	Pasar	8	Rp 0, 00	0	Rp 17.948 .558.9 31,00	4	Rp 12.674 .548.8 35,00	5	Rp 1.436. 960.83 2,00	1	Rp 2.586.17 7.851,00	0	Rp 0, 0	0	Rp 0, 00	6	Rp 4.023.13 8.683,00	100 %	31%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang mendapat alokasi anggaran	Pasar	18	Rp 0, 00	0	Rp 9.794. 600.55 0,00	18	Rp 5.110. 988.50 0,00	0	Rp 0, 0,00	0	Rp 459.384. 250,00	0	Rp 0, 0	0	Rp 0, 00	0	Rp 459.384. 250,00	0%	8%

			Pembe rdayaa n Pengel ola Sarana Distrib usi Perdag angan		Jumla h pesert a sosiali sasi pelaya nan prima	Oran g	500	Rp 0, 00	0	Rp 566.30 0.000, 00	60	Rp 56.609 .500,0	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,0 0	0	Rp 0, 00	0	Rp 0,00	0%	0%
																						50		
																						%		
																						SR		
Me nin gka tny a day a sain g sekt or per dag ang an	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERDAGANGA N																							

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Nilai	<9	Rp 0,00	0	Rp 443.746.500,00	<9	Rp 1.039.410.000,00	0,1	Rp 9.650.000,00	0.1	Rp 718.028.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0.2	Rp 727.678.000,00	0%	70%
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	persen	80	0	80	0	23.47	0	23.47	0	0	23.47	0	0	23.47	29%				
	Jumlah barang kebutuhan pokok yang terupdate harga dan stoknya	Produk Persentase	NA	Rp 0,00	0	Rp 443.746.500,00	15	Rp 900.900.000,00	15	Rp 8.937.500,00	15	Rp 632.387.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	15	Rp 641.325.000,00	100%	71%
	Persentase	100	100	0	100	0	25	0	50	0	0	75	0	0	75	75%				
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																				

g sekt or per dag ang an	PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Non Migas	USD	1.5	Rp	Rp	1.3	Rp	2.06	Rp	36557	Rp	Rp	Rp	5.71	Rp	43%	46%
				E+0 9	0, 00	0 00	E+0 9	2.756. 3,66	E+0 8	542.09 00	5.156, 805	741.212. 960,00	0 0	0, 00	0 00	E+0 8		
	Penyelen ggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)	a. Persenta se produk unggula n yang difalisita si ekspor melalui promosi dan misi dagang	Perse n	5	Rp	Rp	5	Rp	0	Rp	5	Rp	Rp	Rp	5	Rp	100	46%
				5	0, 00	0 00	5	2.756. 3,66	0	542.09 00	5	741.212. 960,00	0	0, 00	0	8.116,00	%	46%

Me nin gka tny a day a sain g sekt or per dag angan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUN GAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang terstandari sasi	%	95	Rp 0, 00	0	Rp 132.53 7.280, 00	95	Rp 715.04 4.068, 00	36	Rp 160.04 4.970, 00	30.11	Rp 142.481. 355,00	0	Rp 0,0 0	0	Rp 0, 00	66.1 1	Rp 302.526. 325,00	69%	42%

Me nin gka tny a day a sain g sekt or ind ustr i	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Dibina / Dikembang kan	%	3.2 8	Rp 0, 00	0	Rp 6.414. 075.66 7,00	3.2	Rp 5.925. 788.03 8,00	0.8	Rp 341.61 4.200, 00	0.75	Rp 233.468. 670,00	0	Rp 0,0 0	0	Rp 0, 00	1.55	Rp 575.082. 870,00	48%	9%

		Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK																		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	a. jumlah indikator pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	Indikator	8	Rp 0,00	0	Rp 6.414.075.667,00	8	Rp 5.925.788.038,00	0	Rp 341.614.200,00	5	Rp 233.468.670,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	5	Rp 575.082.870,00	62%	9%
	b. Jumlah IKM yang terstandarisasi	IKM	700		0		500		80		83		0		0		163		32%	

																	47								
																	%								
																	SR								
Me nin gka tny a day a sain g sekt or ind ustr i	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan	Perse n	0.8	5	Rp 0, 00	0	0	Rp 50.000 .000,0	0.1	7	Rp 129.40 0.000,	0	Rp 0,00	0.12	Rp 20.550.0 00,00	0	Rp 0,0 0	0	Rp 0, 00	0.12	Rp 20.550.0 00,00	70%	15%

		Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait																			
	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/dikeluarkan	Rekomendasi	210	00	0	0	90	00	0	0,00	21	00,00	0	0	0	00	21	00,00	23%	15%
											Rp 50.000.000,0										
											Rp 129.400.000,0										
											Rp 20.550.000,0										
											Rp 0,0										
											Rp 0,0										
											Rp 20.550.000,0										

																	23					
																	%					
																	SR					
Me nin gka tny a day a sain g sekt or ind ustr i	URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLA AN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Database IKM yang Terupdate	Perse n	2.3	Rp 0, 00	0	Rp 250.00 0.000, 00	0.4	Rp 50.000 .000,0	0	Rp 0, 00	0.25	Rp 49.950.0 00,00	0	Rp 0, 00	0	Rp 0, 00	0.25	Rp 49.950.0 00,00	54%	99%
			Penyedia an Informasi Industri	Jumlah IKM yang	IKM	480	Rp 0, 00	0	Rp 250.00 0.000, 00	160	Rp 50.000 .000,0	0	Rp 0, 00	43	Rp 49.950.0 00,00	0	Rp 0, 00	0	Rp 0, 00	52	Rp 49.950.0 00,00	32%

																32 %			
																SR			
									Rp 7.318. 838.0 46,00		Rp 12.300 .197.7 09,00		Rp 0, 00		Rp 0,0 0		Rp 7.318. 838.0 46,00		
																52 %			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2022 maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada triwulan 2 tahun 2022 telah berhasil mencapai target. Sedangkan untuk kinerja anggaran tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Evaluasi Kinerja Anggaran
Tahun 2022

NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d TRIBULAN 2 TA 2022	
		Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29.413.597.229	12.636.801.761	42,96%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12.850.252.749	4.023.138.683	31,31%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.042.410.000	727.678.000	69,81%
Program Pengembangan Ekspor	2.766.148.153	1.283.308.116	46,39%
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	733.021.575	302.526.325	41,27%
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.927.572.145	575.082.870	9,70%
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	129.400.000	20.550.000	15,88%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	49.950.000	99,90%

Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 8 program dan 18 kegiatan dengan total anggaran dari sebelumnya sebesar Rp. 48.902.830.776,00 dan setelah perubahan anggaran menjadi sebesar 51.696.401.851,00 dengan rincian :

- Belanja Operasi : Rp. 42.583.138.285,00
- Belanja Modal : Rp. 9.113.263.566,00

Adapun realisasi anggaran belanja langsung tahun 2022 Semester 1 per sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2022 (s/d 30 Juni 2022)

PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,413,597,229.00	12,636,801,761.00	42.96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,620,000.00	10,620,000.00	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,149,000.00	5,149,000.00	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,740,000.00	10,705,000.00	49.24
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,584,000.00	4,334,000.00	23.32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,923,903,201.00	10,105,539,962.00	46.09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89,311,915.00	89,094,770.00	99.76
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,160,000.00	2,160,000.00	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	250,250,000.00	199,910,000.00	79.88
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7,212,000.00	0.00	0.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,602,900.00	0.00	0.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,818,400.00	33,197,635.00	98.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	992,600,000.00	477,494,560.00	48.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36,871,275.00	18,166,800.00	49.27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,980,000.00	1,805,000.00	9.03
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,777,500.00	9,547,500.00	50.85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467,022,674.00	202,085,378.00	43.27
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,254,000,000.00	0.00	0.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	311,649,800.00	308,163,697.00	98.88
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	995,748,800.00	0.00	0.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	1,000,000.00	20.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	732,660,232.00	340,215,497.00	46.44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,132,090,032.00	451,443,635.00	39.88
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,925,000.00	32,779,550.00	21.89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	604,920,500.00	192,514,827.00	31.82
Pemeliharaan Mebel	15,000,000.00	9,919,000.00	66.13
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330,000,000.00	106,048,950.00	32.14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00	24,907,000.00	49.81
Jumlah	29,413,597,229.00	12,636,801,761.00	42.96
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12,850,252,749.00	4,023,138,683.00	31.31
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	5,112,191,000.00	459,384,250.00	8.99
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7,624,461,749.00	3,563,754,433.00	46.74
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	56,800,000.00	0.00	0.00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	56,800,000.00	0.00	0.00
Jumlah	12,850,252,749.00	4,023,138,683.00	31.31
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1,042,410,000.00	727,678,000.00	69.81

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	903,900,000.00	641,325,000.00	70.95
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	138,510,000.00	86,353,000.00	62.34
Jumlah	1,042,410,000.00	727,678,000.00	69.81
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2,766,148,153.00	1,283,308,116.00	46.39
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	50,688,630.00	33,040,650.00	65.18
Pameran Dagang Nasional	449,800,000.00	298,799,700.00	66.43
Pameran Dagang Lokal	385,129,108.00	130,291,290.00	33.83
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	1,300,000,000.00	391,327,876.00	30.10
Peningkatan Citra Produk Ekspor	226,142,630.00	224,613,400.00	99.32
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	354,387,785.00	205,235,200.00	57.91
Jumlah	2,766,148,153.00	1,283,308,116.00	46.39
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	733,021,575.00	302,456,325.00	41.26
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	454,032,075.00	196,163,530.00	25.00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	278,989,500.00	106,292,795.00	38.10
Jumlah	733,021,575.00	160,044,970.00	21.83
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4,711,572,145.00	575,082,870.00	12.21
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	10,650,000.00	0.00	0.00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,269,100,000.00	264,955,500.00	20.88
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1,081,000,000.00	274,080,900.00	25.35
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,329,196,966.00	20,897,770.00	0.90
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	21,625,179.00	15,148,700.00	70.05
Jumlah	4,711,572,145.00	575,082,870.00	12.21
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	129,400,000.00	20,550,000.00	15.88

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	129,400,000.00	20,550,000.00	15.88
Jumlah	129,400,000.00	20,550,000.00	15.88
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
Jumlah	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90

Dari hasil capaian diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator tercapai dari target yang yang ditetapkan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 juga memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tribulan 1 tahun 2022.

Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Semester I meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan
2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan
3. Hasil Rencana Program & Kegiatan

Pada evaluasi penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana berikut :

- a. Isu-isu strategis, permasalahan yang ada dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki.
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra PD,
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- g. Kebijakan rasionalisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sehingga berdampak pada perubahan target.

Dalam melakukan evaluasi kinerja kami menggunakan pengukuran dengan menghitung persentase capaian kinerja pada masing-masing kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Penghitungan capaian kinerja tersebut dilakukan terhadap komponen indikator kinerja pada pengukuran kinerja, indikator kinerja pada pencapaian tingkat capaian kegiatan yang pada akhirnya ditetapkan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai tingkat pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 juga memperhatikan arah kebijakan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, oleh

karena itu Renja tersebut tidak jauh dari program-program yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut.

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan 1 Tahun 2022 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dapat diambil beberapa kesimpulan capaian pelaksanaannya antara lain :

1. Masih adanya kegiatan yang kurang mendapat tanggapan positif dari masyarakat pelaku usaha kecil sehingga peminat maupun kemeriahan acara kurang maksimal.
2. Kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman personel terhadap aturan perindustrian dan perdagangan sehingga masih tumpang tindihnya fungsi layanan kepada masyarakat.
3. Kurangnya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan, terlihat dari beberapa kegiatan yang di beberapa tempat dengan personel terbatas dan harus berpindah ke lokasi lain dalam rangkaian acara yang bersamaan. Oleh karenanya diperlukan diperlukan pembenahan manajemen dan pengawasan melekat serta upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan realisasi kegiatan setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi rutin.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Renstra yang telah disusun terbagi dalam dua program yaitu :

1. Program Utama (Teknis)

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting ;
- c) Program Pengembangan Ekspor ;
- d) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ;
- e) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ;
- f) Program Pengendalian Izin Industri Kabupaten/ Kota ;

g) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ;

2. *Program Pendukung (Generik)*

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Pada semester 1 tahun 2022 ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pelayanan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo meliputi :

1. Pelayanan Verifikasi Teknis Izin Usaha dan Industri;
2. Pelayanan Perhitungan Nilai Investasi (Klasifikasi Industri);
3. Penerbitan Surat Keterangan IKM/UMKM;
4. Penerbitan Rekomendasi Pendirian Swalayan;
5. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
6. Pelayanan Tera / Tera Ulang;
7. Pemakaian Bangunan Stand;
8. Pemakaian Kembali Bangunan;
9. Balik Nama Atas Pemindahan Tanganan Pemakaian Bangunan;
10. Pemakaian Fasilitas Pasar Lainnya.

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	IKM Naik Kelas			N/A	300	400	500	N/A	0	400	500	
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri			0,86	0,93	1,1	1,3	0,86	0	1,1	1,3	
3	Pertumbuhan Ekspor Non- Migas			1.200.000.000 USD	1.300.000.000 USD	1.350.000.000 USD	1.400.000.000 USD	1.200.000.000 USD	0	1.350.000.000 USD	1.400.000.000 USD	
4	Persentase Peningkatan UTTP yang di Tera/Tera Ulang			N/A	0,50%	1%	1,50%	N/A	0	1%	1,50%	
5	Nilai SKM Terhadap Layanan Pasar			N/A	77	77	77	N/A	0	77	77	
6	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			N/A	16,17	16,22	16,24	N/A	0	16,22	16,24	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 23 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada unsur manajemen organisasi yang dirumuskan dalam 5 M (Man, Material, Method, Money, dan Market) maka identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. *Rendahnya IKM yang Berstandarisasi*

Pertumbuhan Industri di Kabupaten Sidoarjo 5 tahun terakhir sejak tahun 2016 s/d 2020 rata - rata 0,64%. Sehingga perlu upaya optimalisasi dalam pertumbuhannya.

2. Belum disahkannya Kebijakan Daerah yang Mengatur Tentang Industri Bagi IKM
3. Belum disahkannya Perbup RIPIK (Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten)
4. Rendahnya IKM yang memiliki SNI/terstandarisasi, jumlah IKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang ber SNI hanya sekitar 5,30%
5. Kurang Lancarnya Pasokan Distribusi Bahan Pokok Kebutuhan Masyarakat Menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan, Bencana Alam dan Anomali Cuaca yang Dapat Meningkatkan Harga/Tingkat Inflasi yang Harus Diantisipasi dengan Baik

6. Memasuki Era Pasar Bebas Terlebih Dahulu Dimulainya Kerjasama China

Asean Free Trade Agreement (CAFTA) menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dalam negeri serta pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan serta menerapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor impor.

Isu kritical komoditi bahan pangan pokok :

- Kondisi pasokan dan harga pangan pokok di dalam negeri biasanya dipengaruhi oleh faktor produksi yang bersifat musiman, cuaca ekstrim, masalah distribusi dan faktor eksternal
- Faktor produksi yang bersifat musiman dan cuaca ekstrim sangat terkait dengan fluktuasi harga produk hortikultura seperti cabai dan bawang
- Faktor distribusi secara umum produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi

7. Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan serta menerapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor impor.

Isu kritical komoditi bahan pangan pokok:

- Kondisi pasokan dan harga pangan pokok di dalam negeri biasanya dipengaruhi oleh faktor produksi yang bersifat musiman, cuaca ekstrim, masalah distribusi dan faktor eksternal.
- Faktor produksi yang bersifat musiman dan cuaca ekstrim sangat terkait dengan fluktuasi harga produk hortikultura seperti cabai dan bawang.
- Faktor distribusi secara umum produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi.

8. Belum Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan, dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah- masalah. Upaya yang dapat dilakukan ke depan dalam mendukung akses dan ketersediaan informasi adalah dengan melaksanakan diseminasi data dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan, mewujudkan sinkronisasi data. Dinas perindustrian dan perdagangan tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin industri hanya sekedar memberikan rekomendasi sehingga IKM yang mengurus ijin usaha tidak terekam atau tidak terdeteksi ke dalam direktori data yang ada di dinas.

9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar yang Kurang Representatif

Minimnya penambahan aset sarana dan prasarana pasar serta kurangnya tingkat kesadaran pedagang untuk mendukung kebersihan pasar, sehingga upaya menaikkan kelas pasar pada arah pemenuhan pasar ber SNI mengalami kendala, demikian pula pertumbuhan pasar modern/minimarket memperlemah peran dan fungsi pasar tradisional.

10. Pertumbuhan Pasar Modern/*Minimarket* yang Terus Meningkat Setiap Tahunnya dengan *Brand Image* Pasar Modern/*Minimarket* dengan Sarana dan Prasarana yang Representatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk selanjutnya, di tahun 2022, terdapat perubahan kegiatan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dari dinas. Hal ini dikarenakan mengikuti dari RPJMD 2021-2026 yang berisikan visi dan misi dari kepala daerah. namun pada tahun berjalan beberapa perubahan dilakukan sebagai penyesuaian terhadap

refocusing anggaran. Refocussing anggaran bertujuan untuk memfokuskan anggaran kegiatan yang lebih prioritas.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Semester 1 Tahun 2022 melaksanakan berbagai kegiatan sebagai wujud dari pemenuhan salah satu misi yaitu untuk pemulihan perekonomian melalui optimalisasi potensi Industri dan Perdagangan. Adapun untuk program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Urusan Perindustrian :

Penguatan Sektor IKM agar mampu bertahan dan di era globalisasi dengan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Pelatihan desain produk terdiri dari Kecamatan Tanggulangin, Candi, Gedangan, Porong, Krian, Sidoarjo dan Waru
2. Pelatihan desain dan sertifikasi produk di Kecamatan Tulangan
3. Pelatihan diversifikasi dan sertifikasi produk di Kecamatan Krian
4. Pelatihan inovasi/diversifikasi produk makanan di Kecamatan Jabon
5. Pelatihan Sistem Manajemen Mutu di Kecamatan Waru

Urusan Perdagangan

Kegiatan yang dilaksanakan bidang Perdagangan dalam upaya meningkatkan jumlah IKM naik kelas di Kabupaten Sidoarjo diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pelatihan Prosedur Ekspor
2. Pembinaan Ekspor Secara Konvensional dan Online
3. Pendampingan Pembuatan Video Profil IKM
4. Pelatihan E-Commerce dan Branding
5. Sosialisasi Business Matching
6. Pelatihan Search Engine Optimization dan Kiat-Kiat Berdagang Online
7. Sosialisasi Pembinaan Peningkatan Citra Produk Ekspor
8. Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai visi "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan" Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah, serta perannya sebagai Dinas Teknis yang menangani Perindustrian, Perdagangan, serta Pasar Rakyat tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah "*Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri, Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan, dan Meningkatkan Layanan Pasar Rakyat*" dengan sasaran dan tujuan tersebut diharapkan nantinya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dapat meningkat melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Industri, Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan, dan Peningkatan Layanan Pasar Rakyat.

Diantara program - program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdapat program yang mendukung program prioritas pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh Bupati terpilih. Adapun prioritas tersebut adalah 20.000 UMKM naik kelas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Tujuan di susunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan untuk tahun anggaran 2022 sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta isu permasalahan yang perlu ditangani. Sedangkan sasaran di susunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah tersusunnya rencana kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana dana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
- b. Peningkatan Pendapatan per kapita masyarakat
- c. Pertumbuhan Ekonomi
- e. Pemberdayaan ekonomi daerah

Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mempunyai 8 Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Yang dilaksanakan dalam 18 Kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

10. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
11. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
12. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
14. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
15. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
16. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
17. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
18. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari kegiatan ini akan dibagi kedalam beberapa sub kegiatan. Sub kegiatan ini menjadi indikator kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Sub kegiatan dibuat menyesuaikan dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat berlangsung sesuai tujuan yang sudah dibuat.

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur		Target
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											29,413,597,229	26,433,830,501			0			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											56,093,000	35,843,000			0			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 dokumen	1 dokumen	90 Persen	16.02 Persen	10,620,000	10,620,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 dokumen	1 dokumen	90 Persen	16.02 Persen	5,149,000	5,149,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 dokumen	1 dokumen	90 Persen	16.02 Persen	21,740,000	15,740,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen Jumlah dokumen movev PD yang tersusun	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 dokumen	1 dokumen	90 Persen	16.02 Persen	18,584,000	4,334,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											22,015,375,116	21,566,870,847			0		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	175 ASN	160 ASN	90 Persen	16.02 Persen	21,923,903,201	21,466,130,432	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	80 jenis	80 jenis	90 Persen	16.02 Persen	89,311,915	98,580,415	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Laporan	1 Laporan	90 Persen	16.02 Persen	2,160,000	2,160,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											257,462,000	200,000,000			0		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen		1 Tahun	90 Persen	16.02 Persen	250,250,000	200,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD SKPD yang dilakukan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 kali	0 kali	90 Persen	16.02 Persen	7,212,000	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											11,602,900	11,602,900			0		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	4 kali	1 kali	90 Persen	16.02 Persen	11,602,900	11,602,900	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,569,069,849	1,566,519,582				0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 Jenis	10 Jenis	90 Persen	16.02 Persen	33,818,400	36,036,664	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah BBM yang disediakan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Bulan	12 Bulan	90 Persen	16.02 Persen	992,600,000	1,007,132,142	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 Bulan	9 Jenis	90 Persen	16.02 Persen	36,871,275	59,758,275	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah buku bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 bulan	5 jenis	90 Persen	16.02 Persen	19,980,000	6,660,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

Fasilitas Kunjungan Tamu	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1000 paket	567 paket	90 Persen	16.02 Persen	18,777,500	26,932,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	100 %	80 Persen	90 Persen	16.02 Persen	467,022,674	430,000,001	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2,561,398,600	361,315,640			0		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	2 unit	0 unit	90 Persen	16.02 Persen	1,254,000,000	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pengadaan Mebel	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah meubeleur yang diadakan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	20 unit	20 unit	90 Persen	16.02 Persen	0	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	10 unit	35 unit	90 Persen	16.02 Persen	311,649,800	361,315,640	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	1 Paket	0 Paket	90 Persen	16.02 Persen	995,748,800	0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,869,750,264	1,792,682,032			0		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5000 buah	3000 buah	90 Persen	16.02 Persen	5,000,000	3,020,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	12 bulan	12 bulan	90 Persen	16.02 Persen	732,660,232	725,100,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	20 orang 4 orang 4 orang 15 orang	20 orang 4 orang 4 orang 15 orang	90 Persen	16.02 Persen	1,132,090,032	1,064,562,032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,072,845,500	898,996,500		0		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	16 unit 16 unit	16 unit 16 unit	90 Persen	16.02 Persen	72,925,000	72,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	40 unit 40 unit	40 unit 40 unit	90 Persen	16.02 Persen	604,920,500	464,471,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pemeliharaan Mebel	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	20 unit	141 unit	90 Persen	16.02 Persen	15,000,000	15,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	5 unit	30 unit	90 Persen	16.02 Persen	330,000,000	246,600,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah luas gedung/kantor/ruang dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 Persen	96 Persen	200 meter ²	200 meter ²	90 Persen	16.02 Persen	50,000,000	100,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	96 Persen	0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											12,850,25 2,749	12,500,48 9,263		0		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											12,736,65 2,749	12,441,56 1,763		0		
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar SNI	Jumlah pasar yang mendapat alokasi anggaran	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.26 Persen	1 kali	19 pasar	77	77	5,112,191,000	4,893,022,014	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pasar SNI	5.26 Persen	0
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar SNI	Jumlah pasar yang dipenuhi sarana dan prasarananya	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.26 Persen	1 kali	19 pasar	77	77	7,624,461,749	7,548,539,749	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pasar SNI	5.26 Persen	0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											113,600,000	58,927,500		0		
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar SNI	Jumlah pedagang pasar yang dimonitor dari tidak aktif menjadi aktif Jumlah pengelola pasar yang dilatih dan dibina	Nilai SKM terhadap layanan pasar		15.78 Persen	15.78 Persen		50 orang 30 orang	77	77	56,800,000	26,327,500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pasar SNI	15.78 Persen	0
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi	Persentase Pasar SNI	Jumlah peserta sosialisasi	Nilai SKM terhadap layanan pasar	Kab. Sidoarjo, Semua	15.78 Persen	15.78 Persen	0 kali	60 orang	77	77	56,800,000	32,600,000	PENDAP ATAN ASLI	Persentase Pasar SNI	15.78 Persen	0

Perdagangan		pelayanan prima		Kecamatan, Semua Kelurahan									DAERAH (PAD)				
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											1,042,410,000	812,300,000			0		
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											903,900,000	675,350,000			0		
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Jumlah paket sembako yang diberikan kepada masyarakat Jumlah pelaksanaan operasi pasar Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah di update harganya	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<9 Nilai 80 Persen	<9 Nilai 80 Persen	3000 Paket 1 Kali 1 Kali	100 %	100 %	903,900,000	675,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	<9 Nilai 80 Persen	0		
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											138,510,000	136,950,000			0		

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Jumlah distributor pupuk yang menyampaikan laporan penyaluran pupuk bersubsidi Jumlah distributor pupuk yang menyampaikan laporan penyaluran pupuk bersubsidi Jumlah laporan atas pupuk dan pestisida bersubsidi (volume/tonase) yang disalurkan oleh Distributor	Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase kinerja realisasi pupuk	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Seluruh Kelurahan	<9 Nilai 80 Persen	<9 Nilai 80 Persen	50 Perusahan 12 Laporan Perusahan 50 Laporan Perusahan 12 Laporan	50 Perusahan 50 Laporan Perusahan 12 Laporan	80 % 100 % 80 % 100 %	80 % 80 % 100 % 100 %	138,510,000	136,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	<9 Nilai 80 Persen	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											2,766,148,153	2,578,874,230			0	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											2,766,148,153	2,578,874,230			0	

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah produk yang difasilitasi ekspor	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non Migas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130000000 U	SD130000000 U	SD40 UKM	40 UKM	2 Kegiatan 130000000 U 2 Kegiatan 130000000 U	2 Kegiatan S2DKegiatan 130000000 U S1D300000000 U	SD 50,688,630 SD	33,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Ekspor Non Migas	130000000 U	SD 0
Pameran Dagang Nasional	Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah produk unggulan yang difasilitasi pameran dagang nasional Jumlah produk unggulan yang difasilitasi	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non Migas	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130000000 U	SD130000000 U	2 Kegiatan 40 UKM SD2 Kegiatan 40 UKM 50 UKM	2 Kegiatan 2 Kegiatan 40 UKM 40 UKM 50 UKM	2 Kegiatan 130000000 U 2 Kegiatan 130000000 U	2 Kegiatan S2DKegiatan 130000000 U S1D300000000 U	449,800,000 SD SD	455,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Ekspor Non Migas	130000000 U	SD 0

		pameran dagang nasional Jumlah UKM yang difasilitasi pameran dagang nasional															
Pameran Dagang Lokal	Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah Fasilitas IKM Yang Bermitra Dengan Retail Jumlah Fasilitas IKM Yang Bermitra Dengan Retail Jumlah kegiatan pameran dagang lokal yang diselenggarakan Jumlah kegiatan pameran	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non Migas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1300000000 U	SD1300000000 U	2 Kali 100 UKM SD2 Kali 100 UKM 50 UKM	2 Kali 2 Kali 100 UKM 100 UKM 50 UKM	2 Kegiatan 1300000000 U 2 Kegiatan 1300000000 U	2 Kegiatan S2DKegiatan 1300000000 U S1D300000000 U	385,129,108 SD SD	269,431,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Ekspor Non Migas	1300000000 U	SD 0	

		dagang lokal yang diselenggarakan Jumlah UKM yang difasilitasi pameran dagang lokal															
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah produk ekspor unggulan yang difasilitasi misi dagang Jumlah produk ekspor unggulan yang difasilitasi misi dagang Jumlah Produk Ekspor Unggulan Yang Difasilitasi Misi Dagang Jumlah Produk Ekspor	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non Migas		130000000 U	SD130000000 U	50 Produk s100 Produk D 50 Produk 100 Produk	50 Produk 100 Produk	2 Kegiatan 130000000 U 2 Kegiatan 130000000 U	2 Kegiatan S2DKegiatan 130000000 U S1D300000000 U	1,300,000,000 SD SD	1,350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Ekspor Non Migas	130000000 U	SD 0	

		Unggulan Yang Difasilitasi Misi Dagang															
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah produk ekspor yang ditingkatkan pencitraannya Jumlah produk ekspor yang ditingkatkan pencitraannya Jumlah Produk Ekspor yang ditingkatkan pencitraannya Jumlah Produk Ekspor yang ditingkatkan pencitraannya	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non Migas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1300000000 U	SD1300000000 U	50 IKM s50 Produk D 50 IKM 50 Produk	50 IKM 50 Produk	2 Kegiatan 1300000000 U 2 Kegiatan 1300000000 U	2 Kegiatan S2DKegiatan 1300000000 U S1D300000000 U	226,142,630 SD SD	226,142,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Ekspor Non Migas	1300000000 U	SD0	

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Dibina Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina Jumlah Perusahaan Ekspor Yang Menyampaikan Laporan Ekspor Import Jumlah Perusahaan Ekspor Yang Menyampaikan Laporan Ekspor Import	Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Jumlah Fasilitas Pameran Dagang Nasional Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non Migas	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1300000000 U	SD1300000000 U	50 Perusahaan Produk SD150 50 Perusahaan Produk SD150 50 Perusahaan Produk SD150	50 Perusahaan Produk SD150 50 Perusahaan Produk SD150 50 Perusahaan Produk SD150	2 Kegiatan 1300000000 U 2 Kegiatan 1300000000 U	2 Kegiatan S2DKegiatan 1300000000 U S1D300000000 U	SD 354,387,785 SD	245,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Ekspor Non Migas	1300000000 U	SD 0
PROGRAM STANDARDI SASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											733,021,575	603,521,575		0		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											733,021,575	603,521,575		0		

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTTP yang terstandarisasi	Jumlah UTTP yang telah di tera dan tera ulang Jumlah UTTP yang telah di tera dan tera ulang Jumlah UTTP yang telah di tera dan tera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan Jumlah UTTP yang telah di tera dan tera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Jumlah UTTP yang telah di tera dan tera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan Jumlah UTTP yang telah di tera dan tera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	15100 Unit 10200 UTTP 15100 Unit 10200 UTTP	15100 Unit 15100 Unit 10.2 UTTP 10200 UTTP 10200 UTTP	15100 Unit 10200 UTTP 15100 Unit 10200 UTTP	15100 Unit 15100 Unit 10200 UTTP 10200 UTTP	454,032,075	352,832,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase UTTP yang terstandarisasi	95 Persen	0
--	--------------------------------------	--	--	---	-----------	-----------	--	---	--	--	-------------	-------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase UTTP yang terstandarisasi	Jumlah kegiatan sidang tera yang dilaksanakan dan dievaluasi Jumlah kegiatan sidang tera yang dilaksanakan dan dievaluasi jumlah peserta sosialisasi metrologi legal yang dilaksanakan dan dievaluasi jumlah peserta sosialisasi metrologi legal yang dilaksanakan dan dievaluasi Jumlah sosialisasi metrologi legal yang dilaksanakan dan dievaluasi Jumlah sosialisasi metrologi legal yang dilaksanakan dan dievaluasi Jumlah sosialisasi metrologi legal yang dilaksanakan dan dievaluasi	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Jumlah UTTP yang telah ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan Jumlah UTTP yang telah ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan Jumlah UTTP yang telah ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan/tahun berkenaan	Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	95 Persen	19 Kali 50 UTTP 500 Orang 10 Kali 500 Orang 10 Kali 19 Kali 50 UTTP	19 Kali 19 Kali 500 Orang 500 Orang 10 Kali 10 Kali 50 UTTP 50 UTTP	15100 Unit 10200 UTTP 15100 Unit 10200 UTTP 10200 UTTP	15100 Unit 15100 Unit 10200 UTTP 10200 UTTP	278,989,500	250,689,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase UTTP yang terstandarisasi	95 Persen	0
---	--------------------------------------	---	--	---	-----------	-----------	--	--	--	--	-------------	-------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------	---

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	Jumlah rekomendasi rencana pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	IKM naik kelas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2 Persen 100 Persen	3.2 Persen 100 Persen	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	300 IKM	300 IKM	10,650,000	8,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	3.2 Persen 100 Persen	0
--	---	--	----------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------	---------	---------	------------	-----------	------------------------------	---	--------------------------	---

Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Sumber Daya Industri (IKM) yang dibina dan dibangun	IKM naik kelas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2 Persen 100 Persen	3.2 Persen 100 Persen	330 IKM	90 IKM	300 IKM	300 IKM	1,591,700,000	420,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	3.2 Persen 100 Persen	0
--	--	--	----------------	--	--------------------------	--------------------------	---------	--------	---------	---------	---------------	-------------	------------------------------	--	--------------------------	---

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	Jumlah IKM yang difasilitasi Promosi Produk Industrinya Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi (SNI, Merek, Sertifikasi Halal, Ijin Edar, dll) Jumlah industri yang difasilitasi perbaikan Desain Produk IKM	IKM naik kelas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2 Persen 100 Persen	3.2 Persen 100 Persen	0 IKM 60 IKM 32 IKM	0 IKM 150 IKM 16 IKM	300 IKM	300 IKM	758,400,000	791,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	3.2 Persen 100 Persen	0
---	--	---	----------------	--	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	Jumlah IKM yang diberdayakan	IKM naik kelas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2 Persen 100 Persen	3.2 Persen 100 Persen	80 IKM	0 IKM	300 IKM	300 IKM	3,625,000,000	2,329,196,966	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	3.2 Persen 100 Persen	0
--	--	------------------------------	----------------	--	--------------------------	--------------------------	--------	-------	---------	---------	---------------	---------------	--------------------------------------	--	--------------------------	---

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	Jumlah IKM yang dimonitor dan dievaluasi	IKM naik kelas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.2 Persen 100 Persen	3.2 Persen 100 Persen	100 IKM	50 IKM	300 IKM	300 IKM	21,625,179	21,959,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase IKM yang Dibina / Dikembangkan Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	3.2 Persen 100 Persen	0
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA											129,400,000	86,400,000		0		
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											129,400,000	86,400,000		0		

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah, izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Jumlah Industri yang mengajukan verifikasi teknis dalam rangka pengajuan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,17 %	0,17 %	50 Industri	50 Industri	0.93 Persen	0.93 Persen	129,400,000	86,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah, izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,17 %	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											50,000,000	50,000,000		0		
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000		0		

Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase data base IKM yang terupdate	Jumlah industri yang mendapatkan informasi dan analisa industri melalui SIINas	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 IKM	80 IKM	50 Industri	50 Industri	0.93 Persen	0.93 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase data base IKM yang terupdate	80 IKM	0
											52,992,204,885	46,636,071,874			0	

3.4. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
3. Prioritas pengembangan sistem Perindustrian dan Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan

3.5. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Pada Renja tahun 2022 direncanakan ada 8 (delapan) program dan 18 (lima belas) kegiatan, adapun tujuan dan sasaran program/kegiatan 2022 ditetapkan indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini telah dapat memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.

Tercapainya tujuan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan serta menentukan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo dalam 1 tahun.
2. Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan.
3. Terwujudnya penilaian kinerja serta kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terukur antara perencanaan dan pelaksanaan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kinerja urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Sidoarjo, 30 Juni 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIDOARJO**



Drs. Ec. TJARDA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196401051988101003